

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap bentuk implementasi Taiwan *New Southbound Policy* (NSP) dalam menanggapi wisatawan muslim dari Indonesia. Menariknya, penelitian ini tidak hanya menggunakan analisis Diplomasi Publik dari S.L. Roy yang menjelaskan dari sisi hubungan Taiwan dan Indonesia, melainkan juga menggunakan analisis konsep Pariwisata Halal dari Moh Battour dan Moh Nazari Ismail. Sehingga menghasilkan model pariwisata baru yang pelayanannya menggunakan landasan dasar kaidah Islam.

Sebagai negara terbesar ketujuh dalam sumber modal investasi, Taiwan menempati posisi target sasaran potensial investasi negara-negara yang mampu memberikan kepastian hukum dan pendapatan tertinggi. Diketahui bersama bahwa wisata halal merupakan strategi pendorong pemerataan investasi dan pemasok tumbuhnya rantai bisnis industri halal. Sehingga bagi mereka, wisata halal adalah suatu bentuk yang menjanjikan kebutuhan investasi, yang bisa dipadukan dengan kebutuhan agama. Bentuk-bentuk ruang lingkup halal pun beragam, mencakup sasaran potensial pariwisata bisnis, pagelaran *trade fair* yang bekerja sama dengan KADIN setempat, konvensi internasional, wisata bisnis dengan menunjukkan daerah-daerah potensial untuk investasi, dan sebagainya.

Menjawab kebutuhan konsep pariwisata halal oleh wisatawan muslim Indonesia menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah Taiwan dalam menerapkan upaya kerja sama. Taiwan sendiri sebagai tujuan destinasi wisata bagi wisatawan muslim Indonesia, dengan harapan berhasil menciptakan lingkungan berkonsep

*muslim friendly house*. Meskipun keduanya merupakan entitas *stakeholder* yang memiliki tingkat kecocokan tinggi, serta ketertarikan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan, namun masih perlu dibutuhkan pertimbangan khusus secara seksama dan berhati-hati dikarenakan adanya isu hubungan lintas selat yang membawa kondisi hubungan Taiwan dan Indonesia menjadi rumit. Menjadi penting bagi Taiwan untuk merumuskan kebijakan dengan berorientasi pada pemenuhan kepentingan nasional di atas kepentingan mitranya.

Selain itu, Taiwan memiliki kendala mengenai pengakuan kedaulatan penuh atas negaranya karena menganut prinsip *One China Policy*. Sengketa kedaulatan antara Taiwan dengan Tiongkok menghambat interaksi antara Indonesia dengan Taiwan. Meskipun terdapat dua sistem pemerintahan yang berbeda, kebijakan *One China Policy* sudah terlahir memiliki pandangan hanya ada satu negara yakni Tiongkok. Indonesia sendiri mengakui adanya kehadiran Taiwan, tapi tidak untuk mengakui Taiwan sebagai sebuah Negara yang berdaulat dan merdeka dari Tiongkok. Hal inilah pola hubungan Taiwan dilakukan secara *de facto*. Elizabeth Freund Larus (2006) mengatakan bahwa diplomasi pragmatis Taiwan dibentuk melalui hubungan semi-resmi dengan negara lain melalui pengelolaan hubungan tidak resmi oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa hubungan kepentingan ekonomi melalui pembentukan relasi non-politik yang bertujuan untuk memperluas peran internasional Taiwan (Larus 2006, 23-52).

Secara pragmatis, keberadaan Taiwan yang diakui secara *de facto* namun tidak secara *de jure*, membuat Taiwan semakin mengembangkan hubungan antarpemerintah dengan negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik

dengannya. Hal tersebut dilaksanakan agar mengaktifkan kembali kerja sama dengan negara lain (Pegg 2014, 9-11). Indonesia sendiri tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan, hanya sebatas hubungan bilateral di bawah prinsip Taiwan *New Southbound Policy* (NSP) atau Kebijakan Baru ke Arah Selatan. Kebijakan NSP merupakan kebijakan yang dirilis pada 2016 oleh masa pemerintahan Presiden Tsai Ing Wen dan Wakil Presiden Chen Chien-Jen, yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan mendorong sejumlah bidang ekonomi seperti investasi, perdagangan, serta sosial kemasyarakatan seperti pariwisata, pendidikan dan ketenagakerjaan antara Taiwan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, maka menjadi penting untuk memahami terlebih dahulu landasan pembentuk hubungan antara Indonesia dan Taiwan. Dilihat dari sisi Taiwan, kerja sama dengan Indonesia didorong oleh tiga hal utama. Hal pertama adalah karena untuk keluar dari ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok. Hubungan kerja sama ekonomi dan investasi, telah membuat Taiwan menjadi sangat bergantung pada Tiongkok yang dapat menyediakan buruh murah bagi industri Taiwan. Hal tersebut memungkinkan akan berdampak buruk dan membahayakan bagi Taiwan sendiri. Pada akhirnya Taiwan memutuskan membangun hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, yang dapat dijadikan solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut (Larus 2006, 23-52). Karena di sisi lain, sengketa kedaulatan Taiwan dengan Tiongkok memunculkan sikap yang terus bertentangan yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan hubungan dan kebijakan politik yang dapat berubah secara drastis.

Kedua, sebagai pemenuh kepentingan ekonomi Taiwan. Munculnya Taiwan sebagai salah satu “Keajaiban Ekonomi” di dunia pada akhir 1980-an akibat ekspansi industri dan infrastruktur, justru menjadi bahan pertimbangan untuk menjaga sisi kompetitif dari industri yang semakin besar. Salah satunya pertimbangan Taiwan dalam kerja sama harus mengait kerja sama dengan negara lain, dengan kebutuhan akan buruh murah yang kompetitif. Indonesia di mata Taiwan juga memiliki karakteristik buruh kompetitif yang hampir sama dengan Tiongkok. Sebenarnya bisa saja dapat terpenuhi melalui kerja sama dengan Tiongkok, namun kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan pada faktor pertama membuat pemenuhan kepentingan ekonomi ini haruslah dicari dari sumber lainnya (Tanasaldy 2017, 135).

Ketiga, mencegah Taiwan terisolasi dari dunia internasional. Sejak Taiwan kehilangan statusnya sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa, dan Amerika Serikat mengalihkan pengakuan kedaulatan atas Cina Daratan kepada Tiongkok di awal 1970-an, banyak negara di seluruh dunia melakukan hal serupa. Hal tersebut membuat Taiwan kehilangan posisi dan perannya di dunia internasional sebagai sebuah negara yang berdaulat secara *de jure*. Pada waktu yang sama, Tiongkok melancarkan tekanan kepada negara-negara di seluruh dunia untuk tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah entitas berdaulat melalui *One China Policy*, dan mencoba membuat Taiwan terisolasi di mata internasional. Maka sebab itu, dengan membangun kerja sama dengan negara lain di dunia melalui pemanfaatan kekuatan ekonominya, justru menjadikan Taiwan dapat menjaga eksistensinya dengan stabil, hingga terhindar

dari kondisi yang terisolasi di mata dunia internasional. Dengan kata lain, dapat dibayangkan hubungan kerja sama ekonomi yang dibangun Taiwan dengan negara lain akan memberikan keuntungan politik bagi Taiwan (KDEI Taipei 2014).

Seiring berjalannya waktu yang berdasarkan ketiga hal tersebut, salah satu bentuk perwujudan Taiwan untuk menjaga dan memperkuat hubungan bilateralnya adalah dengan membentuk institusi atau serupa kantor perwakilan negara di masing-masing negara mitranya. Salah satunya adalah *Chinese Chamber of Commerce to Jakarta* yakni sebuah kamar dagang Taiwan di Jakarta, yang didirikan pada bulan April 1971. Kemudian Juni 1971, sebagai upaya timbal baliknya, Indonesia mendirikan institusi serupa yakni *Indonesian Chamber of Commerce to Taipei* (Taiwan, ROC 2016).

Institusi tersebut dikelola oleh pemerintah dari masing-masing negara, di mana kamar dagang Taiwan dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan, sedangkan Indonesia oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN, sekarang bernama Badan Intelijen Negara/BIN). Kemudian 1989, *Chinese Chamber of Commerce* resmi berganti nama menjadi *Taipei Economic and Trade Office Indonesia* (TETO) atau Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei di Indonesia. Singkat cerita akhir 2015, telah dibuka kembali kantor perwakilan di Surabaya dengan nama “Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei di Surabaya”. Sedangkan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta atau *The Taipei Economic and Trade Office* (TETO) adalah kantor perwakilan pemerintahan *Republic of China* (Taiwan) di Indonesia. TETO memiliki misi untuk mengurus kepentingan Taiwan

sebagai negara prioritasnya, dan mempromosikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Taiwan (Taiwan, ROC 2016).

Sejalan Indonesia menempati posisi sebagai negara populasi muslim terbesar yang jumlahnya hampir kurang lebih 88,1% beragama Islam, maka Taiwan menggagas ide untuk mengembangkan wisata berkonsep halal atau pariwisata halal dalam sasaran pengembangan pariwisata. Posisi Taiwan sedari dulu sebetulnya dijuluki sebagai negara ketiga populasi rumah ramah muslim atau *muslim friendly house* di dunia setelah Jepang dan Korea Selatan (Kompas 2020). Pengembangan pariwisata halal di Taiwan telah berlangsung sejak 2009 dengan tujuan untuk meningkatkan pasar pariwisata Taiwan bagi wisatawan muslim Indonesia.

Adanya unsur yang selaras dengan konsep pariwisata halal dalam menarik wisatawan Indonesia sepertinya dinilai bagus dalam komunikasi strategi pemasaran wisata, serta sangat cocok apabila dipadukan dengan kebudayaan berunsur rohani bagi calon wisatawan. Pengembangan industri yang diaplikasikan melalui pariwisata halal merupakan alat penggerak bagi pemasuk ekonomi Taiwan dan Indonesia dalam peningkatan ekonomi. Indonesia memiliki peluang yang menjanjikan dalam pengembangan pariwisata halal. Peningkatan jumlah wisatawan antara kedua negara pun beragam dan terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana peningkatan jumlah wisatawan tersebut disebabkan oleh kebutuhan, kepentingan, serta alasan untuk menikmati jenis objek wisata berbeda-beda.

Dilansir dari Webinar “Prospek Wisata Halal Bagi Indonesia: Pengalaman dari Taiwan” pada Rabu 30 September oleh Peneliti P2W LIPI, Rita Pawestri, mengatakan bahwa kalangan menengah keatas menganggap pariwisata bagian dari *lifestyle*, dan pariwisata halal juga memperkenalkan para wisatawan mancanegara untuk mengenalkan sejarah-sejarah penyebaran Islam di Taiwan secara terbuka (LIPI 2020). Dengan begitu, pariwisata halal pun dijadikan sorotan bagi Taiwan terhadap pengembangan wisata yang ramah dan nyaman untuk para *muslim traveler*, dan tingginya potensi pariwisata halal salah satunya dipengaruhi oleh kebutuhan wisata yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

Taiwan berupaya mengembangkan pariwisata halal dengan menyediakan objek-objek nilai yang menjadi kebutuhan dari pariwisata halal, seperti *muslim friendly house*, yang mencakup memberikan fasilitas toilet dengan tempat wudhu dan tempat ibadah di ruang publik atau beberapa sarana prasarana institusi, kemudahan VISA, melakukan kerja sama dengan agen wisata dan otoritas lokal, mengembangkan *Apps. Tourism*, dan melalui kegiatan *Taiwan Expo*. Bentuk kerja sama lainnya dilakukan dengan adanya penyediaan paket promo perjalanan pariwisata halal oleh *travel agent*, baik yang ada di Taiwan maupun Indonesia. Dilansir dari *Cheria Tour Holiday*, agensi perjalanan yang memudahkan akses wisatawan muslim Indonesia dapat menjadi solusi bagi para wisatawan yang ingin berwisata halal di Taiwan, karena hal tersebut adalah bagian dari bentuk perwujudan pemerintah Taiwan dalam promosi dan kerja sama pariwisata pariwisata halal (Cheria Travel 2012).

Pemerintah Taiwan melalui kantor perwakilannya di Indonesia, TETO Surabaya, menyatakan bahwa Taiwan memfokuskan pengembangan *pariwisata halal* terhadap empat aspek sesuai dengan arahan kebijakan NSP. Di antara penerapan kebijakannya tersebut, salah satunya diwujudkan dengan kebijakan dan strategi yang memang secara langsung membidik target wisatawan muslim dengan fokus promosi dan pengembangan lima sertifikasi halal, yang mencakup *muslim restaurant*, *muslim friendly restaurant*, *muslim friendly tourism*, *halal kitchen*, dan *muslim friendly tourist guide* (LIPI 2020). Perlunya penelitian ini digali dan diteliti secara mendalam terkait Taiwan *New Southbound Policy* untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses implikasinya dan bagaimana implementasi hubungan bilateral keduanya dilakukan.

### **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana implementasi *New Southbound Policy* dalam pariwisata halal Taiwan bagi wisatawan muslim Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi *New Southbound Policy* dalam pariwisata halal Taiwan bagi wisatawan muslim Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengetahui kebijakan Taiwan *New Southbound Policy* pada periode kepemimpinan Presiden Tsai Ing Wen periode 2016-2019 terhadap implikasi peluang pariwisata halal Taiwan-Indonesia, serta menilik lebih lanjut mengenai perkembangan pasang surut budaya Islam di ranah Taiwan guna melunturkan distorsi pandangan Barat.



Dikarenakan hal ini juga penting, karena memengaruhi sistem pemasaran strategi pemerintah Taiwan secara signifikan terhadap pengaruh budaya nilai-nilai kultural di Taiwan.

Bila ditinjau dari sifatnya yang praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa hubungan internasional, serta sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Manfaat yang diperoleh juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai isu budaya yang terjadi di Taiwan. Selain itu, dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia, untuk dapat berkaca kepada apa yang telah diupayakan Taiwan telah berhasil menjadi negara yang mampu menumbuhkan laju pertumbuhan ekonominya secara signifikan.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode riset dalam skripsi ini mengacu pada perdebatan besar kedua hubungan internasional antara tradisional dan behavioral atau antara Bull dan Kaplan. Melalui perdebatan tersebut maka digunakan metode yang ditawarkan oleh Morton A. Kaplan yaitu pembuktian hipotesis, penentuan hubungan antar variabel, penentuan proposisi dan penguatan kerangka teori, yang akan dianalisis melalui jenis metode kualitatif. Fokus behavioral pada penelitian yang dijabarkan oleh Kaplan yakni dimaksudkan agar hipotesis dan implikasinya berjalan berdasarkan pada sebab akibat, diuji secara empiris, dikembangkan secara progresif, terutama diperoleh dari penemuan dan pengamatan yang telah

dilakukan lebih besar dalam pengembangan teori (Kaplan 1964, 297). Sedangkan, apabila menggunakan pendekatan historis yang dikaitkan dengan tradisional, yang ditawarkan oleh Bull (1966) bahwa pendekatan tradisional sebagai pendekatan untuk berteori yang berasal dari filsafat, sejarah dan hukum dan yang dicirikan secara tradisional, maka semua bergantung eksplisit pada pelaksanaan atas dasar asumsi dan sangat sedikit signifikansi yang dapat dikatakan tentang hubungan internasional (Bull 1966, 361). Jelas sudah dari definisi yang dijabarkan Bull bisa diasumsikan bahwa pendekatan tradisional menghargai kebijaksanaan berbasis sejarah dalam hal memahami hubungan internasional.

Sementara penggunaan metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah yang dikaitkan dengan behavioral, di mana behavioural memandang perilaku manusia sangat ditentukan dengan kondisi lingkungan luar dan kondisi terhadap manusia tersebut (Gerald 2013, 195). Dalam artian, pendekatan behavioural bersandar pada konsep intensitas dan responden, di mana individu tersebut berperilaku sesuai dorongan yang ia terima, mempelajarinya kemudian menentukan jawaban atas dorongan tersebut. Pendekatan behavioural cenderung bersifat netral dan tidak memihak. Pendekatan behavioural tidak menguraikan asumsi filosofis tertentu secara langsung. Sama halnya antara hubungan internasional dengan manusia, keduanya memiliki sifat yang cenderung negatif dan positif, atau sebaliknya, justru kecenderungan keduanya terbentuk dan ditentukan oleh lingkungan aspek sosial-budayanya.

### **1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lebih dalam, menurut Prof. Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono 2016, 9). Bogdan dan Taylor dalam L.J. Moleong (2006, 44) mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia dan perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan pemaparan pendapat tersebut maka penggunaan metode penelitian kualitatif dikatakan berlandaskan dari latar belakang alamiah studi kasus yang utuh, di mana manusia sebagai kunci dari penggerak penelitian. Serupa dengan tafsiran yang dikemukakan oleh Prof. Lexy J. Moleong (2006, 44) terhadap penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa dalam memanfaatkan metode kualitatif perlu adanya pengadaan analisis data secara induktif lebih terarah, karena untuk menemukan teori yang bersifat deskriptif, serta dalam pelaksanaannya lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitiannya telah disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan subjek penelitian (L. Moleong 2006, 44).

Metode penelitian kualitatif berfokus pada pengamatan yang mendalam, yang dihasilkan dari data-data deskriptif baik tertulis ataupun tidak, dan hasil pengamatan perilaku atau peristiwa. Bisa disebutkan bahwa tipe penelitian yang

digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis. Pengungkapan yang dikemukakan deskriptif analisis bersifat menyeluruh berdasarkan atas fenomena yang terjadi, baik dikumpulkan dari sumber langsung ataupun data tidak langsung. Penelitian ini mengimplikasikan teori yang dipaparkan oleh M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur di dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Ghony and Almansyur 2012, 33-34) yakni :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Hal tersebut berarti penulis menganalisis dan mengelaborasi dengan komprehensif mengenai peluang pariwisata halal yang dijalankan oleh Taiwan kepada Indonesia.
2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan. Hal tersebut memerhatikan penulis apakah pelaksanaan yang dijalankan Taiwan dalam membuka peluang pariwisata halal turut relevan sejalan dengan implikasi *New Southbound Policy*.
3. Metode kualitatif lebih peka dan lebih menyesuaikan dengan latar penelitian, serta mampu melakukan penajaman pola-pola yang dihadapi peneliti.

#### **1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Kata**

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data di samping jenis data yang telah dibuat di muka (Indriantoro and Supomo 2013). Secara garis besar, sumber data terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah keduanya yakni sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara (Sugiyono 2012, 224).

Pertama, peneliti menggunakan teknik observasi. Merujuk pada definisi observasi, peneliti melakukan sejumlah observasi berupa pengamatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan menurut M. Nazir dalam bukunya “Metode Penelitian” (1998, 112) mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Seperti yang dilihat, penelitian ini memperoleh beberapa identifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, literatur-literatur dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Kedua, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dalam hal ini, dokumentasi yang dimaksud termuat dari beberapa karya ilmiah, objek gambar dan grafika, atau tulisan-tulisan ilmiah dari seseorang. Dokumentasi menurut Prof. Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 2015, 329).

Ketiga, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Merujuk pada pandangan Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang ntuk bertukar informasi maupun suatu

ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikecutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Sugiyono 2015, 72). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur di mana dilakukan kepada *key informan* yang berkecimpung di bidang Taiwan. Tujuan dari penggunaan wawancara semi terstruktur ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak sumber informasi dapat menjawab dan menuangkan gagasan ide-ide pendapatnya (Esterberg dalam Sugiyono 2015, 73-74).

Lebih lanjut, penulis mengumpulkan dan menggunakan sumber data dalam wujud data primer dan sekunder yang termuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Ringkasan pencarian data dan fakta

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek Data
Primer	Wawancara	Wawancara kepada unsur <i>key informan</i> yang ahli dalam hubungan kerja sama Pariwisata Halal antara Taiwan - Indonesia, yakni kepada Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) LIPI.	Data terkait meliputi penjelasan dari ahli <i>informan</i> mengenai diplomasi hubungan kerja sama Taiwan - Indonesia melalui latar belakang, implementasi, solusi komprehensif, serta peluang dan tantangannya.

Sekunder	Dokumen	<p>(a) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal-jurnal tentang pariwisata halal, <i>New Southbound Policy Taiwan</i>, kerja sama Taiwan – Indonesia, baik secara umum maupun spesifik pada topik penelitian.</p> <p>(b) Penelaahan dan pencatatan informasi sejarah, status dan <i>profile</i> pemerintahan Taiwan dan <i>Taiwan New Southbound Policy</i>.</p> <p>(c) Penelaahan dan pencatatan isi <i>website</i> resmi dan sah di internet tentang pariwisata halal Taiwan, kerja sama internasional dan peran kebijakan <i>Taiwan New Southbound Policy</i>.</p>	<p>a) Data terkait perkembangan pariwisata halal di Taiwan, dan secara khusus menjelaskan praktik dan kebijakannya.</p> <p>b) Data terkait penjelasan sejarah, status kedudukan dan <i>profile</i> Taiwan, dan <i>Taiwan New Southbound Policy</i>.</p> <p>c) Data terkait mengenai peran Taiwan dalam membuka peluang pariwisata halal bagi wisatawan muslim Indonesia sebagai mitra sasarannya melalui implementasi kebijakan <i>Taiwan New Southbound Policy</i>.</p>
----------	---------	---	--

### 1.5.3. Teknik Validasi Data

Hasil dari penemuan data yang dikumpulkan menjadi sasaran penulis untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Semua bentuk data dilakukan secara bertahap agar teknik pengumpulan data lebih mudah dipahami dan valid. Teknik validasi data merupakan langkah menguji data antara yang sesungguhnya terjadi dengan laporan objek yang sedang diteliti. Untuk menemukan data yang relevan, maka peneliti melakukan validasi data dengan cara triangulasi yang dijabarkan oleh Sugiyono (2008). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang valid, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D 2008, 224).

Triangulasi merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan seorang peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Triangulasi dibagi menjadi tiga cara, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi analisis. Berikut penjelasan menurut Sugiyono di dalam buku Metode Penelitian Pendidikan (2010) :

- i. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menyelidiki data dengan fakta dari sumber yang berbeda dan *key informan* lainnya.
- ii. Triangulasi metode yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data dan hasil wawancara untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.
- iii. Triangulasi sumber data, dilakukan dengan cara meminta umpan balik dari informan yang berguna untuk alasan perbaikan kualitas laporan, data, dan kesimpulan yang tersirat (Metode Penelitian Pendidikan 2010, 330).

Dengan menggali banyak data dari berbagai situs dan sumber, informasi yang didapatkan akan semakin kaya dan relevan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menetapkan dan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode sebagai bahan pertimbangan terhadap sumber data dari hasil wawancara, dokumentasi, buku, *website*, jurnal-jurnal dan literatur lainnya yang telah tersedia.



#### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan apa yang sedang ingin dipecahkan. Begitu juga dengan analisis data, merupakan suatu cara untuk mencari ketepatan secara ilmiah yang dapat dicari kebenarannya sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan didistribusikan kepada kalangan banyak. Menurut Sugiyono (2012, 2) metode analisis data adalah sebuah metode ilmiah untuk memperoleh berbagai data yang akan digunakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode analisis data adalah metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis secara lebih terstruktur, sistematis, dan teratur hingga memiliki makna. Di tahap ini, peneliti menggunakan metode analisis yang berasal dari data kualitatif, yang berdasarkan pada data yang berkaitan dengan diplomasi publik yang dilakukan Taiwan terhadap Indonesia.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan menjawab penelitian yang tertuang di dalam identifikasi masalah maka dibuatlah sistematika yang terdiri dari empat bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan mengenai mekanisme penelitian, yakni terdiri dari uraian kegiatan penelitian latar belakang hubungan Taiwan dan Indonesia dan adanya implikasi kebijakan Taiwan *New Southbound Policy*, serta pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kemudian sistematika penulisan. Bab kedua, berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka teoritik, alur pemikiran serta operasional teori yang membandingkan dengan tulisan-tulisan lain untuk direviu sesuai dengan ketentuan dan

permasalahan di dalam penelitian ini. Bab ketiga adalah analisis dan interpretasi penelitian yang membahas mengenai implementasi Taiwan *New Southbound Policy* dalam membuka peluang pariwisata halal Taiwan kepada wisatawan muslim Indonesia. Bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan dari inferensi penelitian.

